

Received : 15 Jan 2025

Accepted : 15 Jan 2025

Published :10 Feb 2025

**PENGARUH PENGAWASAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
TERHADAP EFEKTIVITAS PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA
DI KABUPATEN BANDUNG BARAT**

Agus Ariyanto¹
Agustina Setiawan²
Yovinus³

1,2,3) Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Fisip Unjani

Email Korespondensi : ariyanto481@gmail.com

Abstrak

Kebijakan pembangunan ekonomi merupakan rangkaian strategi dan tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, mengurangi tingkat kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sesuai dengan amanat Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (SDGs) yaitu pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian survei, yaitu penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut, sehingga ditemukan kejadian-kejadian relatif, distribusi, dan hubungan-hubungan antar variabel. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian eksplanatif (penjelasan) dengan pendekatan kuantitatif. Disebut metode kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik (Sugiyono, 2019:15). Sementara menurut Singarimbun (2011:5) menjelaskan bahwa: Metode eksplanatif yaitu penelitian yang menggunakan minimal dua variabel yang dihubungkan dan mencari hubungan satu variabel dengan variabel lainnya melalui pengujian hipotesa.

Keberhasilan BUMDes di Kabupaten Bandung Barat sangat ditentukan oleh strategi yang diambil oleh pengelola atau pengurus BUMDes. BUMDes sebagai rintisan dikatakan kerap salah memilih potensi untuk digarap. Dari 165 Desa yang ada di Kabupaten Bandung Barat mati

Received : 15 Jan 2025

Accepted : 15 Jan 2025

Published :10 Feb 2025

suri, sebagian besar BUMDes belum dikembangkan secara optimal dan belum bisa melakukan inovasi secara mandiri. Untuk itu penting bagi BUMDes melakukan inovasi dalam strategi bisnisnya, karena jika membangun desa tanpa adanya inovasi maka program BUMDes hanya akan terus jalan di tempat.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan suatu program peningkatan ekonomi masyarakat pedesaan yang dikembangkan oleh Pemerintah Indonesia untuk mendorong tumbuhnya kewirausahaan pedesaan dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang dimiliki desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengawasan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) terhadap efektivitas pengembangan BUMDes di Kabupaten Bandung Barat. Metode penelitian menggunakan eksplanatif dan tipe penelitian metode survey dengan pendekatan kuantitatif. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan studi lapangan yaitu menggunakan kuesioner untuk mengumpulkan data yang terkait dengan variabel penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh individu yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan dan pengembangan BUMDES di Kabupaten Bandung Barat. Penentuan ukuran sampel menggunakan *Stratified Random Sampling* dengan jumlah sampel 94 responden.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah: analisis regresi linier menunjukkan nilai signifikansi $0.000 < 0.05$ artinya pengawasan DPMD berpengaruh terhadap efektivitas pengembangan BUMDes di Kabupaten Bandung Barat. Besarnya pengaruh pengawasan DPMD berdasarkan nilai koefisien determinasi sebesar 87.42% sedangkan sisanya 12.58% dipengaruhi variabel lain yang tidak diteliti. Hasil uji t hitung $(36.514) > t \text{ tabel } (1.66159)$ sehingga hipotesis yang diperoleh adalah bahwa pengawasan DPMD berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengembangan BUMDes di Kabupaten Bandung Barat.

Kata Kunci: Pengawasan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Efektivitas, Badan Usaha Milik Desa

Abstract

Economic development policy is a series of strategies and actions taken by the government to encourage sustainable economic growth, reduce poverty, create jobs, and improve community welfare. This is in accordance with the mandate of the Sustainable Development Goals (SDGs), namely development that maintains an increase in community economic welfare in a sustainable manner, development that maintains the sustainability of community social life, development that maintains the quality of the environment and development that ensures justice and the implementation of governance that is able to maintain an increase in the quality of life from one generation to the next.

Received : 15 Jan 2025

Accepted : 15 Jan 2025

Published :10 Feb 2025

The type of research used is survey research, which is research conducted on large or small populations, but the data studied is data from samples taken from the population, so that relative events, distributions, and relationships between variables are found. The research method used is explanatory research (explanation) with a quantitative approach. It is called a quantitative method because the research data is in the form of numbers and analysis using statistics (Sugiyono, 2019:15). Meanwhile, according to Singarimbun (2011:5), it explains that: The explanatory method is a study that uses at least two variables that are connected and seeks the relationship between one variable and another through hypothesis testing.

The success of BUMDes in West Bandung Regency is largely determined by the strategy taken by the BUMDes managers or administrators. BUMDes as a pioneer is said to often choose the wrong potential to be worked on. Of the 165 villages in West Bandung Regency that are in a coma, most BUMDes have not been optimally developed and have not been able to innovate independently. For this reason, it is important for BUMDes to innovate in their business strategies, because if they build a village without innovation, the BUMDes program will only continue to stagnate.

Village-Owned Enterprises (BUMDes) are a program to improve the economy of rural communities developed by the Indonesian Government to encourage the growth of rural entrepreneurship by utilizing the potential resources owned by the village. This study aims to determine and analyze the influence of supervision by the Community and Village Empowerment Service (DPMD) on the effectiveness of BUMDes development in West Bandung Regency. The research method uses explanatory and survey method research types with a quantitative approach. The data collection method was carried out through literature studies and field studies, namely using questionnaires to collect data related to the research variables. The population in this study were all individuals related to BUMDES supervision and development activities in West Bandung Regency. Determination of sample size using Stratified Random Sampling with a sample size of 94 respondents.

The results of the study obtained were: linear regression analysis showed a significance value of $0.000 < 0.05$, meaning that DPMD supervision had an effect on the effectiveness of BUMDes development in West Bandung Regency. The magnitude of the influence of DPMD supervision based on the determination coefficient value of 87.42% while the remaining 12.58% was influenced by other variables not studied. The results of the t -test $(36.514) > t$ table (1.66159) so that the hypothesis obtained was that DPMD supervision had a positive and significant effect on the effectiveness of BUMDes development in West Bandung Regency.

Keywords: *Supervision of the Community and Village Empowerment Service, Effectiveness, Village-Owned Enterprises*

Received : 15 Jan 2025

Accepted : 15 Jan 2025

Published :10 Feb 2025

PENDAHULUAN

Kebijakan pembangunan ekonomi merupakan rangkaian strategi dan tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, mengurangi tingkat kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sesuai dengan amanat Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (SDGs) yaitu pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Dalam upaya mewujudkan otonomi desa dan mendorong perekonomian diperdesaan tersebut, maka salah satu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yaitu dengan membentuk suatu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) melalui pengembangan potensi desa dan partisipasi masyarakat. Dengan pengelolaan BUMDES, maka akan mendorong kuatnya ekonomi desa dan menciptakan kemandirian perekonomian desa. Tujuan didirikannya BUMDes, tercantum dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

BUMDes dibentuk dan dibangun oleh pemerintah desa dengan kepemilikan modal dan pengelolaannya dilaksanakan oleh pemerintah desa bersama masyarakat. Pembentukan dan pengelolaan BUMDes oleh pemerintah desa didasari atas otonomi daerah dengan yaitu adanya Peraturan desa dan berpedoman pada Peraturan Daerah. BUMDes pada operasionalnya menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola dengan profesional oleh pengurusnya. Pendirian dan pembentukan BUMDes dilaksanakan melalui musyawarah desa yaitu dengan melihat kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat. Melalui musyawarah desa, maka BUMDes dibangun atas prakarsa masyarakat dan dapat menampung aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, BUMDes didasari pada prinsip kooperatif partisipatif dan transparansi. Prinsip pengelolaan BUMDes dilaksanakan sepenuhnya

Received : 15 Jan 2025

Accepted : 15 Jan 2025

Published :10 Feb 2025

oleh masyarakat desa sehingga BUMDes pada operasionalnya ditopang oleh lembaga moneter desa (unit pembiayaan). Jika lembaga ekonomi kuat dan ditopang kebijakan yang memadai, pertumbuhan ekonomi yang disertai pemerataan distribusi aset kepada masyarakat secara luas akan mampu menanggulangi berbagai permasalahan ekonomi dipedesaan. Tujuan akhirnya, BUMDes sebagai instrumen merupakan modal sosial yang diharapkan mampu menjembatani upaya penguatan ekonomi dipedesaan.

Menurut data di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bandung Barat memiliki total 165 desa yang tersebar di 16 kecamatan, saat ini terdapat 162 BUMDes yang aktif beroperasi. BUMDes di Kabupaten Bandung Barat mulai berdiri kembali setelah adanya Dana Desa dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Geliat Undang-Undang Desa mendorong desa-desa di Kabupaten Bandung Barat mendirikan BUMDes. Pada kenyataannya tidaklah mudah dalam mengembangkan BUMDES di Kabupaten Bandung Barat. Berbagai permasalahan yang dihadapi menjadi tantangan tersendiri yang harus dihadapi dalam memajukan BUMDes. Beberapa permasalahan BUMDes antara lain permasalahan komunikasi diantara pengurus, pengelolaan unit usaha, masalah personil, dan potensi desa yang belum dapat dimanfaatkan. Permasalahan pengelolaan BUMDes di beberapa desa antara lain jenis usaha yang dijalankan masih terbatas, keterbatasan sumber daya manusia yang mengelola dan rendahnya partisipasi masyarakat karena masih minimnya pengetahuan mereka. Selain itu, unit usaha BUMDes belum mampu memberdayakan masyarakat dan mengurangi tingkat pengangguran karena total penyerapan tenaga kerja dari unit-unit usaha BUMDes masih sedikit, walaupun omzet BUMDES sudah bagus namun profit yang diperoleh masih sangat kecil sehingga belum mampu memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa.

Keberhasilan dalam pengelolaan BUMDes tentu perlu ada pengawasan dari pihak yang berwenang baik dari Pemerintah Desa maupun Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah melalui DPMD, memiliki kewenangan untuk mengawasi pengelolaan BUMDes di wilayahnya. Hal ini berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah memiliki tugas dan wewenang untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan,

Received : 15 Jan 2025

Accepted : 15 Jan 2025

Published :10 Feb 2025

program, dan kegiatan yang dilakukan oleh desa termasuk BUMDes. Pengawasan yang tepat dapat meminimalkan risiko terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan BUMDes, ini diharapkan dapat membantu mengatasi beberapa masalah yang terkait dengan pengelolaan BUMDes dan dapat membantu mempercepat pertumbuhan ekonomi desa (Susilowati et all, 2016: 3).

Tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) menurut Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi Dan Rincian Tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa adalah: melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Salah satu fungsi DPMD adalah pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa melalui BUMDes. Peningkatan ekonomi masyarakat menjadi salah satu fokus perhatian pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, termasuk DPMD Kabupaten Bandung Barat. Salah satu fokus pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh DPMD Kabupaten Bandung Barat adalah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat Kabupaten Bandung Barat. Peningkatan ekonomi ini sangat penting dilakukan guna memberikan kesejahteraan pada masyarakat. Upaya peningkatan ekonomi masyarakat ini, harus terus didukung dan dikembangkan seiring dengan perkembangan zaman dan daya saing pada era globalisasi saat ini.

Efektivitas pengembangan BUMDes di Kabupaten Bandung Barat tidak lepas dari pengawasan DPMD. Berdasarkan fenomena-fenomena di atas, menunjukkan bahwa pengelolaan BUMDES belum berjalan sebagaimana yang telah direncanakan sebelumnya. Beberapa indikasi yang mengarah pada permasalahan efektivitas pengembangan BUMDes di Kabupaten Bandung Barat adalah:

1. Banyak masalah yang dihadapi oleh pengurus BUMDES sendiri seperti sumber daya manusia yang belum baik dari segi tingkat pendidikan.
2. Manajemen pengelolaan belum terlaksana dengan maksimal.
3. Kurangnya menunjangnya fasilitas sarana dan prasarana produksi.
4. Masalah soal insentif pengurus karena kerja tanpa digaji.
5. Masalah soal daya dukung masyarakat desa dan kurang adanya dukungan dari

Received : 15 Jan 2025

Accepted : 15 Jan 2025

Published :10 Feb 2025

Pemerintah Desa setempat.

6. Terlalu kuat campur tangan Pemerintah Desa yang didominasi oleh Kepala Desa serta kurangnya pengawasan dari pihak yang berwenang.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian survei, yaitu penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut, sehingga ditemukan kejadian-kejadian relatif, distribusi, dan hubungan-hubungan antar variabel.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian eksplanatif (penjelasan) dengan pendekatan kuantitatif. Disebut metode kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik (Sugiyono, 2019:15). Sementara menurut Singarimbun (2011:5) menjelaskan bahwa: Metode eksplanatif yaitu penelitian yang menggunakan minimal dua variabel yang dihubungkan dan mencari hubungan satu variabel dengan variabel lainnya melalui pengujian hipotesa.

KERANGKA PEMIKIRAN

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Pemerintah Desa diberikan pilihan untuk mendirikan sebuah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai alat untuk mendorong kemandirian Desa, dengan mengelola potensi yang dimiliki desa seoptimal mungkin. BUMDes ini diharapkan mampu meningkatkan pemberdayaan masyarakat serta memudahkan desa untuk mendapatkan sumber pendapatan lain yang akan meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Desa dapat mendirikan BUMDes dengan modal yang berasal dari Alokasi Dana Desa yang diberikan Pemerintah pusat yaitu Pemerintah Kabupaten yang langsung memberikan dana tersebut kepada masing-masing desa, sehingga pihak Kecamatan tidak ada sangkut paut dengan BUMDes yang didirikan oleh Desa. kemudian besaran jumlah dana yang dipakai disesuaikan dengan kebijakan prioritas Desa.

Pendirian BUMDES tidak cukup untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi.

Received : 15 Jan 2025

Accepted : 15 Jan 2025

Published :10 Feb 2025

Banyak BUMDes yang telah berdiri tetapi berhenti ditengah jalan karena berbagai macam faktor. Minimnya strategi yang digunakan sehingga fungsi-fungsi manajemen tidak terlaksana seperti *planning*, *organizing*, *actuating* dan *controlling* yang menyebabkan tujuan pendirian BUMDes tidak berjalan. BUMDes berdiri hanya karena tuntutan dan tekanan dari pemerintah pusat, maka walaupun desa belum siap tetapi dipaksakan harus berdiri. Sehingga banyak masalah yang kemudian muncul karena perencanaan yang tidak matang.

Keberhasilan BUMDes di Kabupaten Bandung Barat sangat ditentukan oleh strategi yang diambil oleh pengelola atau pengurus BUMDes. BUMDes sebagai rintisan dikatakan kerap salah memilih potensi untuk digarap. Dari 165 Desa yang ada di Kabupaten Bandung Barat mati suri, sebagian besar BUMDes belum dikembangkan secara optimal dan belum bisa melakukan inovasi secara mandiri. Untuk itu penting bagi BUMDes melakukan inovasi dalam strategi bisnisnya, karena jika membangun desa tanpa adanya inovasi maka program BUMDes hanya akan terus jalan di tempat.

Pengawasan adalah proses pengamatan yang dilakukan oleh pimpinan untuk mengetahui hasil dari pekerjaan bawahan agar dapat mengetahui tingkat kesalahan yang dilakukan para pegawai sehingga dapat diperbaiki sesuai dengan rencana atau prosedur. Oleh karena itu pengawasan dimaksudkan agar tujuan yang dicapai sesuai dengan atau tidak menyimpang dari rencana yang telah ditentukan, maka kegiatan pengawasan mengandung kegiatan pemberian bimbingan, petunjuk atau instruksi.

Pengawasan dilakukan untuk mengetahui apa saja yang harus dicapai dari pelaksanaan pekerjaan dan melakukan penilaian artinya sehingga jika terjadi penyimpangan dapat dilakukan tindakan perbaikan agar sesuai dengan rencana yang ditetapkan semula. Definisi tersebut menekankan pada pentingnya informasi mengenai aktivitas yang sebenarnya terjadi melalui pengamatan atau pemantauan untuk kemudian dibandingkan dengan rencana atau standar yang telah dibuat sebelumnya.

Pengawasan dapat dilakukan dengan baik apabila didasarkan oleh langkah- langkah atau pedoman yang dijadikan acuan dalam pelaksanaannya. Agar pengawasan mencapai hasil yang diharapkan, maka pimpinan organisasi atau unit organisasi yang melakukan pengawasan harus

Received : 15 Jan 2025

Accepted : 15 Jan 2025

Published :10 Feb 2025

memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip pengawasan.

Pengawasan yang baik dapat menunjukkan dan menemukan kelemahan- kelemahan dari kegiatan organisasi, sehingga kelemahan tersebut dapat diperbaiki dan tidak terulang kembali. Pengawasan yang baik harus dilakukan secara sistematis sesuai dengan prinsip-prinsip pengawasan. Handyaningrat (1996:149-150) mengemukakan prinsip-prinsip pengawasan yang meliputi:

1. Pengawasan berorientasi kepada tujuan organisasi.

Maksud prinsip ini adalah pengawasan yang baik harus dilaksanakan oleh siapa saja yang berfungsi melaksanakan pengawasan adalah orientasinya terhadap tujuan organisasi yang ditetapkan, artinya apabila terjadi penyimpangan maka penyimpangan tersebut harus diliraskan kembali apakah sudah sesuai dengan tujuan organisasi belum.

2. Pengawasan harus objektif, jujur dan mendahulukan kepentingan umum dari pada kepentingan pribadi.

Ini berarti bahwa di dalam pelaksanaan pengawasan harus dihindarkan adanya selera subjektif, tetapi harus berdasarkan ukuran-ukuran objektif. Harus jujur artinya kalau ada penyimpangan maka harus dilihat apa adanya tidak boleh ditutup-tutupi serta sesuaikan dengan kepentingan umum bukan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu yang bermaksud mencari keuntungan di dalam kesempatan.

3. Pengawasan harus berorientasi terhadap kebenaran menurut peraturan-peraturan yang berlaku (*wetmatigheid*), berorientasi terhadap kebenaran atas prosedur yang telah ditetapkan (*rechmatigheid*) dan berorientasi terhadap tujuan (manfaat) dalam pelaksanaan pekerjaan (*doelmatigheid*). Pengawasan harus berdasarkan peraturan, prosedur dan tujuan yang ditetapkan, tidak boleh menyimpang dari aturan, prosedur maupun tujuan. Jadi jika pengawasan dilakukan menyimpang dari ketiga kebenaran tersebut, maka pengawasan tidak akan mencapai tujuan yang diharapkan.

4. Pengawasan harus menjamin daya guna dan hasil guna pekerjaan.

Artinya harus hemat, ekonomis baik dari segi waktu, biaya, tenaga serta bahan yang tersedia, selain tercapai hasil optimal sesuai dengan yang direncanakan juga hanya

Received : 15 Jan 2025

Accepted : 15 Jan 2025

Published :10 Feb 2025

menghabiskan input yang relatif lebih kecil daripada output yang diproduksi.

5. Pengawasan harus berdasarkan standar yang objektif, teliti (*accurate*) dan tepat.

Artinya harus digunakan ukuran yang dapat dipertanggungjawabkan kualitasnya, penentuan standar harus teliti dan tepat, artinya sesuai sama sekali dengan ketentuan yang ditetapkan secara universal.

6. Pengawasan harus bersifat terus menerus (*continue*)

Artinya pengawasan harus dilakukan sejak perencanaan, pelaksanaan pekerjaan dan evaluasi hasil pekerjaan tanpa terputus-putus.

7. Hasil pengawasan harus dapat memberikan umpan balik (*feed back*) terhadap perbaikan dan penyempurnaan dalam pelaksanaan, perencanaan dalam dan kebijaksanaan waktu yang akan datang.

Artinya hasil pengawasan harus dijadikan bahan masukan untuk upaya perbaikan dan penyempurnaan dimasa yang akan datang.

Dengan melaksanakan prinsip-prinsip pengawasan tersebut diharapkan pengembangan Badan Usaha Milik Desa dapat dilaksanakan secara menyeluruh dan efektif, menyeluruh dalam arti pengawasan yang dilakukan dapat mencapai tujuan sedangkan efektif dapat mencapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan ditentukan oleh kemampuan para pegawai yang secara hierarki menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Dalam hal ini efektivitas kinerja sumber daya manusia dalam organisasi sangat menentukan tingkat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Pengawasan adalah salah satu unsur dalam rangka meningkatkan efektivitas kinerja pegawai. Pelaksanaan pengawasan sangat penting dalam mendukung efektivitas kinerja. Dengan demikian efektivitas kinerja dapat tercapai melalui pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan. Polemik atas pengelolaan BUMDesa diantaranya berkenaan dengan efektivitas pengembangan BUMDes di Kabupaten Bandung Barat. Dalam mengukur dimensi atau kriteria efektivitas, peneliti menggunakan model ukuran efektivitas yang dikemukakan oleh *Goggin, et all* (dalam Soemaryadi. 2005 : 111-113) yakni sebagai

Received : 15 Jan 2025

Accepted : 15 Jan 2025

Published :10 Feb 2025

berikut:

1. Prosedur (*Compliance*), adalah semua aktifitas implementasi yang dijalankan oleh implementor (Pelaksana) sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang dinyatakan secara tegas dan autoritatif dalam petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis.
2. Tujuan/hasil (*Result*) yaitu menyangkut tujuan dan persoalan dasar (Substansial) yang hendak dipecahkan melalui kebijakan (*Problem solving oriented*).
3. Perlu adanya tindakan-tindakan pemantauan (*Monitoring*) dan evaluasi sebagai upaya untuk memantau secara berkala agar efektivitas berjalan tidak menyimpang dari tujuan yang telah digariskan, karena dapat melakukan perbaikan- perbaikan sesegera mungkin. Upaya ini dapat dilakukan secara langsung yaitu melalui laporan-laporan atau catatan tertulis.

Dengan demikian, efektivitas pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan suatu pencapaian dari kegiatan sesuai dengan yang telah direncanakan, semakin besar pencapaian yang diperoleh BUMDes, maka semakin efektif kinerja serta pengelolaan dalam pelaksanaannya. Efektivitas yang baik akan memberikan banyak keuntungan bagi organisasi salah satunya dalam pencapaian tujuan akan mudah tercapai serta pengelolaan BUMDes yang dilakukan secara baik juga akan mampu memberikan dampak secara ekonomi bagi masyarakat desa.

Keterkaitan antara pengawasan dengan efektivitas seperti dikemukakan tersebut bahwa pengawasan dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan mengukur tingkat efektivitas dan efisiensi kerja personel dengan atau tanpa menggunakan metode dan alat tertentu dalam usaha mencapai tujuan bersama.

Sasaran dari pengawasan adalah mewujudkan dan meningkatkan efisiensi, efektivitas, rasionalitas, dan keterkaitan dalam mencapai tujuan pelaksanaan tugas-tugas organisasi. Dengan begitu setiap kegiatan yang dilakukan akan berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Dari pendapat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pengawasan berkaitan erat dengan efektivitas.

Received : 15 Jan 2025

Accepted : 15 Jan 2025

Published :10 Feb 2025

PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif Variabel Penelitian.

Deskripsi variabel penelitian bertujuan untuk mengetahui gambaran masing-masing variabel penelitian yang disajikan dengan statistik deskriptif. Jawaban yang responden berikan akan dideskripsikan dalam bentuk nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata dan standar deviasi. Hasil statistik deskriptif variabel penelitian dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pengawasan Dinas	94	33	83	53.43	12.582
Pemberdayaan					
Efektivitas Pengembangan	94	19	50	32.99	7.704
BUMDes					
Valid N (listwise)	94				

Sumber: Hasil Olah Data Penelitian, 2024

Berdasarkan data pada tabel tersebut, sampel yang digunakan adalah 94 responden. Hasil statistik deskriptif dalam penelitian ini dapat dijelaskan yaitu:

a. Pengawasan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD)

Variabel pengawasan memiliki nilai minimum sebesar 33 dan nilai maksimum sebesar 83. Variabel pengawasan yang diukur dengan 17 item pernyataan dengan pengukuran Skala Likert 5 poin memiliki nilai rata-rata sebesar 53.43 dengan nilai standar deviasi sebesar 12.582. Nilai standar deviasi tersebut lebih rendah dibandingkan dengan nilai rata-rata, yang artinya sebaran jawaban responden terkait variabel pengawasan DPMD sudah merata.

b. Efektivitas Pengembangan BUMDes.

Received : 15 Jan 2025

Accepted : 15 Jan 2025

Published :10 Feb 2025

Variabel efektivitas pengembangan BUMDes memiliki nilai minimum sebesar 19 dan nilai maksimum sebesar 50. Variabel efektivitas pengembangan BUMDes yang diukur dengan 10 item pernyataan dengan pengukuran Skala Likert 5 poin memiliki nilai rata-rata sebesar 32.99, dengan nilai standar deviasi sebesar 7.704. Hal ini berarti nilai standar deviasi ini lebih rendah dibandingkan dengan nilai rata-rata, yang artinya sebaran jawaban responden terkait efektivitas pengembangan BUMDes sudah merata.

1. Analisis Deskriptif Variabel Pengawasan DPMD (X).

Pada sub bab ini akan dipaparkan data hasil tanggapan responden yang berfungsi untuk memperjelas hasil pembahasan. Dengan gambaran data responden, peneliti dapat mengetahui bagaimana kondisi setiap sub variabel (dimensi) yang diteliti. Penelitian ini akan dianalisis masing-masing sub variabelnya secara deskriptif dengan menggunakan perhitungan pengkategorian. Untuk memudahkan peneliti dalam menginterpretasikan data penelitian, klasifikasi data penelitian dibuat menggunakan distribusi frekuensi dengan interval yang sama.

Untuk mengetahui tingkat signifikansi dan pengaruh pada variabel pengawasan DPMD, maka peneliti akan mengukur pengawasan terhadap sub variabel yang terdiri dari:

a. Pengawasan berorientasi kepada tujuan organisasi.

Pengawasan berorientasi kepada tujuan organisasi menjadi tolok ukur tingkat pengawasan DPMD. Untuk mengetahui jawaban responden mengenai pengaruh pengawasan berorientasi kepada tujuan organisasi, maka peneliti menyebarkan kepada 94 responden. Adapun hasil jawaban kuesioner tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel Tanggapan responden terhadap pengawasan berorientasi kepada tujuan organisasi

No	Item Pernyataan	Skor Jawaban										Skor
		5		4		3		2		1		
		f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	
1	X.1	9	9.57	13	13.83	49	52.13	22	23.40	1	1.06	289
2	X.2	5	5.32	14	14.89	33	35.11	38	40.43	4	4.26	260

Received : 15 Jan 2025

Accepted : 15 Jan 2025

Published :10 Feb 2025

3	X.3	6	6.38	15	15.96	39	41.49	32	34.04	2	2.13	273
	Skor Aktual											822
	Skor Ideal											
	5 x 3 x 94											1410

Sumber: Hasil Olah Data, 2024

b. Pengawasan harus objektif.

Pengawasan harus objektif menjadi tolok ukur tingkat pengawasan DPMD. Untuk mengetahui jawaban responden mengenai pengaruh pengawasan objektif, maka peneliti menyebarkan kepada 94 responden. Adapun hasil jawaban kuesioner tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel Tanggapan responden terhadap pengawasan harus objektif

No	Item Pernyataan	Skor Jawaban										Skor
		5		4		3		2		1		
		f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	
1	X.4	5	5.32	35	37.23	29	30.85	20	21.28	5	5.32	297
2	X.5	6	6.38	8	8.51	30	31.91	40	42.55	10	10.64	242
3	X.6	10	10.64	20	21.28	23	24.47	37	39.36	4	4.26	277
	Skor Aktual											816
	Skor Ideal 5 x 3 x 94											1410

Sumber: Hasil Olah Data, 2024

c. Pengawasan harus berorientasi terhadap kebenaran menurut peraturan-peraturan yang berlaku.

Pengawasan harus berorientasi terhadap kebenaran menurut peraturan-peraturan yang berlaku menjadi tolok ukur tingkat pengawasan DPMD. Untuk mengetahui jawaban responden mengenai dimensi tersebut, maka peneliti menyebarkan kepada 94 responden. Adapun hasil jawaban kuesioner tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Received : 15 Jan 2025

Accepted : 15 Jan 2025

Published :10 Feb 2025

Tabel Tanggapan responden terhadap pengawasan harus berorientasi terhadap kebenaran menurut peraturan-peraturan yang berlaku

No	Item Pernyataan	Skor Jawaban										Skor
		5		4		3		2		1		
		f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	
1	X.7	11	11.70	20	21.28	43	45.74	20	21.28	0	0	304
2	X.8	7	7.45	20	21.28	51	54.26	16	17.02	0	0	300
	Skor Aktual											604
	Skor Ideal											
	5 x 2 x 94											940

Sumber: Hasil Olah Data, 2024

d. Pengawasan harus menjamin daya guna dan hasil guna.

Pengawasan harus menjamin daya guna dan hasil guna menjadi tolok ukur tingkat pengawasan DPMD. Untuk mengetahui jawaban responden mengenai dimensi tersebut, maka peneliti menyebarkan kepada 94 responden. Adapun hasil jawaban kuesioner tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel Tanggapan responden terhadap pengawasan harus menjamin daya guna dan hasil guna

No	Item Pernyataan	Skor Jawaban										Skor
		5		4		3		2		1		
		f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	
1	X.9	11	11.70	15	15.96	56	59.57	12	12.77	0	0	307
2	X.10	11	11.70	24	25.53	44	46.81	15	15.96	0	0	313
3	X.11	11	11.70	17	18.09	55	58.51	10	10.64	1	1.06	309
	Skor Aktual											929
	Skor Ideal 5 x 3 x 94											1410

Sumber: Hasil Olah Data, 2024

Received : 15 Jan 2025

Accepted : 15 Jan 2025

Published :10 Feb 2025

e. Pengawasan harus berdasarkan atas standar yang objektif, teliti (*accurate*).

Pengawasan harus berdasarkan atas standar yang objektif, teliti (*accurate*) menjadi tolok ukur tingkat pengawasan DPMD. Untuk mengetahui jawaban responden mengenai dimensi tersebut, maka peneliti menyebarkan kepada 94 responden. Adapun hasil jawaban kuesioner tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel Tanggapan responden terhadap pengawasan harus berdasarkan atas standar yang objektif,teliti(*accurate*).

No	Item Pernyataan	Skor Jawaban										Skor
		5		4		3		2		1		
		f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	
1	X.12	10	10.64	16	17.02	57	60.64	11	11.70	0	0	307
2	X.13	12	12.77	13	13.83	58	61.70	11	11.70	0	0	308
	Skor Aktual											615
	Skor Ideal											
	5 x 2 x 94											940

Sumber: Hasil Olah Data, 2024

f. Pengawasan harus bersifat terus menerus (*continue*).

Pengawasan harus bersifat terus menerus (*continue*) menjadi tolok ukur tingkat pengawasan DPMD. Untuk mengetahui jawaban responden mengenai dimensi tersebut, maka peneliti menyebarkan kepada 94 responden. Adapun hasil jawaban kuesioner tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel Tanggapan responden terhadap pengawasan harus bersifat terus menerus (*continue*)

No	Item Pernyataan	Skor Jawaban										Skor
		5		4		3		2		1		
		f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	
1	X.14	10	10.64	18	19.15	57	60.64	9	9.57	0	0	311
2	X.15	11	11.70	15	15.96	60	63.83	8	8.51	0	0	311

Received : 15 Jan 2025

Accepted : 15 Jan 2025

Published :10 Feb 2025

	Skor Aktual											622
	Skor Ideal											
	5 x 2 x 94											940

Sumber: Hasil Olah Data, 2024

g. Hasil pengawasan harus dapat memberikan umpan balik (*feed back*)

Pengawasan harus dapat memberikan umpan balik (*feed back*) menjadi tolok ukur tingkat pengawasan DPMD. Untuk mengetahui jawaban responden mengenai dimensi tersebut, maka peneliti menyebarkan kepada 94 responden. Adapun hasil jawaban kuesioner tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel Tanggapan responden terhadap harus dapat memberikan umpan balik (*feed back*)

No	Item Pernyataan	Skor Jawaban										Skor
		5		4		3		2		1		
		f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	
1	X.16	10	10.64	16	17.02	58	61.70	10	10.64	0	0	308
2	X.17	10	10.64	17	18.09	54	57.45	13	13.83	0	0	306
	Skor Aktual											614
	Skor Ideal 5 x 2 x 94											940

Sumber: Hasil Olah Data, 2024

Berdasarkan hasil seluruh tanggapan rersponden terhadap variabel pengawasan DPMD, maka selanjutnya adalah menetapkan peringkat untuk variabel pengawasan DPMD dilihat dari perbandingan antara skor aktual dengan skor ideal. Skor aktual diperoleh melalui hasil perhitungan seluruh pendapat responden sesuai klasifikasi bobot yang diberikan (1,2,3,4, dan 5). Sedangkan skor ideal diperoleh melalui perolehan prediksi nilai tertinggi dikalikan dengan jumlah kuesioner dikalikan jumlah responden. Adapun hasil penetapan peringkat variabel pengawasan DPMD dapat dilihat pada tabel berikut:

Received : 15 Jan 2025

Accepted : 15 Jan 2025

Published :10 Feb 2025

Capaian Tanggapan Responden Terhadap Pengawasan DPMD (X)

No	Dimensi	Skor Aktual	Skor Ideal	%	Kategori
1	Pengawasan berorientasi kepada tujuan organisasi.	822	1410	58.30	Cukup Baik
2	Pengawasan harus objektif.	816	1410	57.87	Cukup Baik
3	Pengawasan harus berorientasi terhadap kebenaran menurut peraturan-peraturan yang berlaku.	604	940	64.25	Cukup Baik
4	Pengawasan harus menjamin daya guna dan hasil guna.	929	1410	65.89	Cukup Baik
5	Pengawasan harus berdasarkan atas standar yang objektif, teliti (<i>accurate</i>).	615	940	65.42	Cukup Baik
6	Pengawasan harus bersifat terus menerus (<i>continue</i>).	622	940	66.17	Cukup Baik
7	Hasil pengawasan harus dapat memberikan umpan balik (<i>feed back</i>).	614	940	65.32	Cukup Baik
	Jumlah	5022	7990		

Received : 15 Jan 2025

Accepted : 15 Jan 2025

Published :10 Feb 2025

	Skor Aktual/Skor Ideal x	62.85%	Cukup Baik
	100%		

Sumber: Hasil Olah Data, 2024

2. Analisis Deskriptif Variabel Efektivitas Pengembangan BUMDes di Kabupaten Bandung Barat (Y).

Pada sub bab ini akan dipaparkan gambaran data responden, peneliti dapat mengetahui bagaimana kondisi setiap sub variabel (dimensi) yang diteliti. Penelitian ini akan dianalisis masing-masing sub variabelnya secara deskriptif dengan menggunakan perhitungan pengkategorian. Guna memudahkan peneliti dalam menginterpretasikan data penelitian, klasifikasi data penelitian dibuat menggunakan distribusi frekuensi dengan interval yang sama.

Guna mengetahui tingkat signifikansi dan pengaruh pada variabel efektivitas pengembangan BUMDes, maka peneliti akan mengukur efektivitas terhadap sub variabel yang terdiri dari: a. Prosedural, b. Tujuan/hasil, dan c. Monitoring dan evaluasi.

Penelitian ini dilaksanakan melalui penyebaran kuesioner kepada 94 responden yang terlibat dalam kegiatan pengembangan dan pengelolaan BUMDes di Kabupaten Bandung Barat. Paparan hasil analisis deskriptif variabel efektivitas pengembangan BUMDes di Kabupaten Bandung Barat adalah sebagai berikut:

1. Prosedural.

Prosedural adalah semua aktivitas implementasi yang dijalankan oleh implementor (Pelaksana) sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang dinyatakan secara tegas dan autoritatif dalam petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis. Prosedural menjadi tolok ukur tingkat efektivitas pengembangan BUMDes. Untuk mengetahui jawaban responden mengenai pengaruh prosedural, maka peneliti menyebarkan kepada 94 responden. Adapun hasil jawaban kuesioner tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel Tanggapan responden terhadap prosedural

Received : 15 Jan 2025

Accepted : 15 Jan 2025

Published :10 Feb 2025

[illegible]

Sumber: Hasil Olah Data, 2024

2. Tujuan/hasil.

Guna mengetahui jawaban responden mengenai pengaruh tujuan/hasil, maka peneliti menyebarkan kepada 94 responden. Adapun hasil jawaban kuesioner tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tanggapan responden terhadap tujuan/hasil

[illegible]

Received : 15 Jan 2025

Accepted : 15 Jan 2025

Published :10 Feb 2025

Sumber: Hasil Olah Data, 2024

3. Monitoring dan evaluasi

Guna mengetahui jawaban responden mengenai pengaruh monitoring dan evaluasi, maka peneliti menyebarkan kepada 94 responden. Adapun hasil jawaban kuesioner tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel Tanggapan responden terhadap monitoring dan evaluasi

No	Item Pernyataan	Skor Jawaban										Skor
		5		4		3		2		1		
		f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	
1	Y.8	11	11.70	16	17.02	58	61.70	9	9.57	0	0	311
2	Y.9	10	10.64	17	18.09	54	57.45	13	13.83	0	0	306
3	Y.10	10	10.64	18	19.15	58	61.70	8	8.51	0	0	312
	Skor Aktual											929
	Skor Ideal											
	5 x 3 x 94											1410

Sumber: Hasil Olah Data, 2024

Berdasarkan hasil seluruh tanggapan responden terhadap variabel efektivitas pengembangan BUMDes, maka selanjutnya adalah menetapkan peringkat untuk variabel efektivitas pengembangan BUMDes dilihat dari perbandingan antara skor aktual dengan skor ideal. Skor aktual diperoleh melalui hasil perhitungan seluruh pendapat responden sesuai klasifikasi bobot yang diberikan (1,2,3,4, dan 5). Sedangkan skor ideal diperoleh melalui perolehan prediksi nilai tertinggi dikalikan dengan jumlah kuesioner dikalikan jumlah responden. Adapun hasil penetapan peringkat variabel efektivitas pengembangan BUMDes dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel Capaian Tanggapan Responden Terhadap Efektivitas Pengembangan BUMDes (Y)

No	Dimensi	Skor	Skor	%	Kategori
----	---------	------	------	---	----------

Received : 15 Jan 2025

Accepted : 15 Jan 2025

Published :10 Feb 2025

		Aktual	Ideal		
1	Prosedural	934	1410	66.24	Cukup Baik
2	Tujuan/hasil	1238	1880	65.85	Cukup Baik
3	Monitoring dan evaluasi	929	1410	65.89	Cukup Baik
	Jumlah	3101	4700		
	Skor Aktual/Skor Ideal x 100%	65.99%			Cukup Baik

Sumber: Hasil Olah Data, 2024

KESIMPULAN.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pengawasan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) baik secara partial maupun simultan membawa pengaruh terhadap efektivitas pengembangan BUMDes di Kabupaten Bandung Barat, peneliti berkesimpulan sebagai berikut:

- Analisis deskriptif pengawasan DPMD berdasarkan dimensi prinsip-prinsip pengawasan termasuk dalam predikat cukup baik dengan tingkat capaian responden 62.85% (52.01% - 68%). Diinterpretasikan bahwa penilaian masyarakat tentang pengawasan DPMD dalam kegiatan pengembangan BUMDes sudah dilaksanakan dengan cukup baik.
- Analisis deskriptif efektivitas pengembangan BUMDes di Kabupaten Bandung Barat termasuk dalam predikat cukup baik dengan tingkat capaian responden 65.99% (52.01-68.00%). Dapat diinterpretasikan bahwa penilaian masyarakat tentang pengembangan BUMDes di Kabupaten Bandung Barat cukup efektif.
- Hasil analisis data yang telah dikemukakan dalam bab pembahasan diketahui bahwa t hitung (36.514) > t tabel (1.66159), dan t hitung pada daerah penolakan Hipotesis Nol (H_0) yang menyatakan tidak ada pengaruh pengawasan DPMD terhadap efektivitas

Received : 15 Jan 2025

Accepted : 15 Jan 2025

Published :10 Feb 2025

pengembangan BUMDes di Kabupaten Bandung Barat **ditolak**, dan Hipotesis alternatif (Ha) yaitu ada pengaruh pengawasan DPMD terhadap efektivitas pengembangan BUMDes di Kabupaten Bandung Barat **diterima**.

- Hasil koefisien determinasi menunjukkan bahwa besar pengaruh pengawasan DPMD terhadap efektivitas pengembangan BUMDes di Kabupaten Bandung Barat sebesar 87.42%, sedangkan sisanya 12.58% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.
- Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan pengawasan DPMD terhadap efektivitas pengembangan BUMDes di Kabupaten Bandung Barat, sehingga hipotesis penelitian yang peneliti ajukan yaitu: Pengawasan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan prinsip-prinsip pengawasan, berpengaruh terhadap efektivitas pengembangan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Bandung Barat, telah teruji secara empirik melalui penelitian di lapangan.